



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD RESTU HIDAYAT**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **641451**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.790.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/158 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 460.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
3. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 1.009 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **33.700.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.400.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.300.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **73.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	71.650.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.968.850.000
III. HUTANG	Rp.	90.100.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.878.750.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISKANDAR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 636261

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.300.000.000
1. Tanah Seluas 2.376 m2 di KAB / KOTA BATANG, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/42 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO DD4 1.5 E M-C Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.658.701
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.411.658.701
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.411.658.701

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Desember 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUGENG HARDI WIDIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **743479**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 1.560.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKALONGAN , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 150.000.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPI Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 13.700.000****D. SURAT BERTAHAGA****Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 36.256.505****F. HARTA LAINNYA****Rp. 181.100.000****Sub Total****Rp. 1.941.056.505****III. HUTANG****Rp. 190.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 1.751.056.505****Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ENDANG KOSTAMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **772673**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	60.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/108 m2 di KAB / KOTA PEKALONGAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.000.000
1. MOTOR, YAMAHA 2 PV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.725.569
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	96.725.569
III. HUTANG	Rp.	135.350.253
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-38.624.684

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.